

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI PULAU JAWA DENGAN
OPINI AUDIT**

Masodah Wibisono¹, Laina Zahra², Rino Rinaldo³

^{1, 2, 3} Program Studi Akuntansi, Universitas Gunadarma

Article History

Received : 26-Desember-2023

Revised : 28-Desember-2023

Accepted : 03-Januari-2024

Published : 03-Januari-2024

Corresponding author*:

Masodah Wibisono

Contact:

masodah@staff.gunadarma.ac.id

Cite This Article:

Wibisono, M., Zahra, L. ., & Rinaldo, R. . (2024). PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DI PULAU JAWA DENGAN OPINI AUDIT. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 3(01), 123–131.

DOI:

<https://doi.org/10.56127/jukim.v3i01.1138>

Abstract: *Financial performance and audit opinion are part of accountability and transparency of local government financial management. Audit opinion validates internal control system effectiveness, materiality of recording and its compliance with government accounting standards. Financial performance worth higher if the financial report accures the highest level of audit opinion, that is unqualified opinion. This research aims to identify the influence of local government's financial performance on audit opinion of The Financial Report. The study covers all provinces on the Java Island. Data is obtained from the Provincial Budget Realization Report over the period from 2011 to 2020 derived from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) website and the Provincial Economic Report from Bank Indonesia (BI) website. Financial Performances are measured by Regional Financial Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, PAD Efficiency Ratio, and Growth Ratio. Ordinal logistic regression analysis model is applied to analyze data, is preceded by model feasibility test and model suitability test. SPSS Software is used to perform data analysis. The results show that the Independence Ratio and Growth Ratio of Local Governments financial performance have an effect on Audit Opinion, while the Effectiveness Ratio and Efficiency Ratio have no effect on Audit Opinion. The research model is declared eligible.*

Keywords: *Financial Performance, Accountability, Transparency and Audit Opinion*

Abstrak: Kinerja keuangan dan opini audit merupakan bagian dari akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Opini audit memvalidasi efektivitas sistem pengendalian internal, materialitas pencatatan dan kepatuhannya terhadap standar akuntansi pemerintah. Kinerja keuangan bernilai lebih tinggi jika laporan keuangan memperoleh opini audit tertinggi, yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap opini audit. Kajian ini mencakup seluruh provinsi di pulau jawa. Data diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Provinsi selama periode 2011 hingga 2020 dari situs web Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Laporan Perekonomian Provinsi dari situs web Bank Indonesia (BI). Kinerja Keuangan diukur dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, dan Rasio Pertumbuhan. Model analisis regresi logistik ordinal digunakan untuk menganalisis data, didahului dengan uji kelayakan model dan uji kesesuaian model. Software SPSS digunakan untuk melakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian dan Rasio Pertumbuhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Opini Audit, sedangkan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi tidak berpengaruh. Model penelitian dinyatakan memenuhi syarat.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Akuntabilitas, Transparansi dan Opini Audit

PENDAHULUAN

Tata kelola keuangan daerah dan pertanggungjawabannya telah diatur dalam UU No 9 Tahun 2015 beserta perubahan-perubahannya dan UU No 17 tahun 2003. Peraturan ini merupakan bentuk kejelasan hukum, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen pengukur kinerja dan mengendalikan pemeritintahan daerah untuk meminimalkan potensi terjadinya kecurangan-kecurangan dan penyimpangan (Sumarsono, 2010). Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) di susun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Prestasi kerja diantaranya dapat diukur melalui pendekatan kinerja.

Kinerja dari pemerintah daerah akan menunjukkan seberapa baik pelaksanaan otonomi daerah, sehingga hal tersebut penting untuk diukur (Saputra, Suwendra dan Yudiantmaja 2016). Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonom daerah dituntut untuk efektif dan efisien, dan mampu mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan, sehingga dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Susilowati, Suharno, dan Kristianto 2016).

Prestasi kerja pemerintah daerah dapat diukur dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program kerja dan kegiatan yang dilakukan. Tata kelola keuangan daerah diukur dengan mendasarkan pada aspek efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam periode tertentu. Sementara itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi satu indikator penting keberhasilan tersebut. Pertumbuhan PAD selama 10 tahun terakhir propinsi di pulau Jawa disajikan berikut ini:

Tabel 1 Pertumbuhan PAD Propinsi di Pulau Jawa 10 tahun

Tahun	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	DIY	DKI Jakarta	Banten
2011	0.12	0.16	0.22	0.25	0.38	0.68
2012	0.13	0.19	0.08	0.1	0.24	0.17
2013	0.24	0.24	0.21	0.19	0.22	0.21
2014	0.22	0.21	0.25	0.18	0.16	0.19
2015	0.07	0.1	0.07	0.16	0.08	0.01
2016	0.06	0.06	0.03	0.15	0.1	0.11
2017	0.07	0.09	0.1	0.15	0.19	0.04
2018	0.1	0.09	0.07	0.16	-0.01	0.11
2019	0.08	0.05	0.04	0.17	0.05	0.11
2020	-0.07	-0.05	-0.07	0.15	-0.18	0.16

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa pemerintahan propinsi di pulau Jawa selama kurun waktu 9 tahun terakhir terlihat bahwa terjadi pertumbuhan PAD. Pertumbuhan minus/negatif terjadi Pada tahun 2020 di Jawa, Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI, terjadi sebagai dampak terjadi Pandemi Covid 19. Berbagai kebijakan penangan Covid mengakibatkan turunnya PAD dengan signifikan dan mengakibatkan pertumbuhan 4 Propinsi ini mengalami yang minus/negatif.

Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKPD) pemerintah Provinsi dilakukan BPK. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) termasuk opini audit akan dipublikasi ke masyarakat. Hasil audit BPK, ukuran kinerja keuangan, dapat pula dinilai melalui rasio keuangan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Heriningsih dan Rusherlistyani (2013) menyebutkan bahwa semakin baik kinerja keuangan dan tingkat akuntabilitas keuangan pemerintah, maka harapan penyalahgunaan aset yang terjadi di daerah semakin berkurang. Fenomena perbaikan opini BPK terjadi selama sepuluh tahun terakhir. Secara umum Pemerintahan Propinsi di Pulau Jawa menunjukkan perbaikan opini BPK, seperti terlihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 2 Perkembangan Opini Audti BPK Propinsi di Pulau Jawa 10 tahun

Tahun	Jawa Barat	Jawa Tengah	Jawa Timur	DIY	DKI Jakarta	Banten	% WTP
2011	WTP	WTPDPP	WTP	WTP	WTPDPP	WDP	0.50
2012	WTP	WTPDPP	WTP	WTP	WTPDPP	WDP	0.50
2013	WTP	WTPDPP	WTP	WTP	WDP	TMP	0.50
2014	WTP	WDP	WTP	WTP	WDP	TMP	0.50
2015	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	0.67
2016	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP	0.83
2017	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	1.00
2018	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	1.00
2019	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	1.00
2020	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	1.00

Sumber : BPK, 2020, data diolah

*WTP : Wajar Tanpa Pengecualian * WTPDPP : WTP Dengan Paragraf Penjelas
 *WDP : Wajar Dengan Pengecualian * TMP: Tidak Memberikan Pendapat

Berdasarkan data tabel 1 terlihat bahwa opini audit BPK terus mengalami perbaikan peningkatan selama 10 tahun. Opini BPK selama 4 tahun terakhir yaitu tahun 2016 – 2020, menunjukkan bahwa semua propinsi di Pulau Jawa memperoleh WTP.

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa pengelolaan organisasi sektor publik didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Masyarakat akan menghendaki program kerja dan kegiatan dapat dilaksanakan oleh pemerintah secara ekonomis, baik untuk pengadaan maupun alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Menurut Mahmudi (2019) Pengukuran kinerja pemerintah berdasarkan aspek keuangan dilakukan dengan mengukur kinerja berdasarkan beberapa rasio keuangan yaitu Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian Belanja, Rasio Derajat Desentralisasi.

Putry dan Badrudin (2017) menemukan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dan rasio pertumbuhan memiliki hubungan yang erat dan positif dengan opini audit. Pratiwi dan Aryani (2016) menyatakan bahwa daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi memiliki kemungkinan memperoleh opini audit yang lebih baik dibandingkan dengan daerah dengan PAD yang lebih kecil karena pemerintahdaerah yang memiliki PAD yang tinggi akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan dan mengungkapkan PAD kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap daerah yang bersangkutan. Zulkarnain dan Andriansyah (2018) menemukan bahwa rasio kemandirianmempengaruhi perolehan opini audit oleh suatu daerah, namun rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian keuangan daerah dan rasio pertumbuhan keuangan daerah tidak memiliki hubungan dengan perolehan opini audit daerah tersebut. Kurnia dan Arza (2019) menemukan bahwa rasio efisiensi dan pertumbuhan PAD memiliki hubungan erat dengan perolehan opini audit.

Hal ini mendorong peneliti tidak hanya mengetahui apakah ada pengaruh antarakerja keuangan daerah dengan opini audit yang dihasilkan oleh provinsi-provinsi yang ada di pulau Jawa. Sehingga diperoleh potret yang menarik terkait kinerja Pemerintahan Propinsi di pulau Jawa. Dalam penelitian ini kinerja keuangan daerah diprosikan dengan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisien dan rasio pertumbuhan

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah Pendapat Audit, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan. Unit penelitian mencakup seluruh provinsi yang terdapat di pulau Jawa yaitu sebanyak 6 provinsi dan unit analisisnya adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah diaudit periode 2011-2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) periode 2011-2020. Data diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Data Perekonomian Provinsi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia serta data opini yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data ini diakses di website/situs situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui www.djpk.kemenkeu.go.id, dan www.bi.go.od. Data opini audit tertera dalam ikhtisar hasil pemeriksaan yang diperoleh dari website Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu www.bpk.go.id.

Pengujian hipotesis dengan analisis Regresi logistik ordinal, memerlukan beberapa pengujian parameter-parameter dari regresi ordinal, yaitu : Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit), Uji Parallel Lines, Uji Keberartian Model (Model Fitting Information), Uji Parameter Estimates/Signifikasi, dan Koefisien Determinasi Model (Pseudo R Square).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Statistik Deskriptif

Tabel 3 Statistik Deskriptif Opini BPK

Jenis Opini	N	Marginal Percentage
OPINI TMP	2	3.3%

WDP	8	13.3%
WTPDPP	5	8.3%
WTP	45	75.0%
Valid	60	100.0%
Missing	0	
Total	60	

Link function: Negative Log-log.

Berdasarkan Tabel. 4.2 dapat disampaikan bahwa opini audit TMP (Tidak Memberikan Pendapat) yang diperoleh Pemerintahan Provinsi selama 10 tahun terakhir hanya 2 periode atau 3.3 persen. Opini TMP diperoleh Propinsi Banten yang terjadi pada tahun 2013 dan 2014. Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualiam) terdapat 8 periode atau sebesar 13.3persen, Opini WDP ini terjadi antara tahun 2011 hingga 2016 yang didapat oleh provinsi Jawa Timur tahun 2015 dan Provinsi Banten tahun 2011,2012 dan 2015, bahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakara memperoleh opini tersebut selama 4 tahun berturut turut yaitu tahun 2013-2016. Opini WTPDPP (Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas) sebanyak 5 periode atau sebesar 8.3 persen, dimana terjadi antara tahun 2011-2013 yang diperoleh Provinsi Jawa Timur tahun 2011, 2012 dan 2013 serta Provinsi DKI Jakarta yaitu tahun 2011dan 2012. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) mendominasi perolehan keenam Propinsidi Pulau Jawa yaitu mencapai 75 persen atau 45 periode. Provinsi Jawa Tengah, Jawa barat, dan DI Yogyakarta adalah Provinsi yang memperoleh opini WTP 10 tahun berturut-turut. Semenatar itu Provinsi Jawa Timur, Banten dan DKI 6, 5 dan 4 tahun berturut-turut.

Tabel 4 Statistik Deskriptif Rasio Kemandirian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KKD	60	.40	5.05	2.1057	1.27788
EFE	60	.41	1.36	1.0402	.12984
EFI	60	.03	.58	.2627	.15907
PERTBHN	60	-.18	.68	.1252	.12669
Valid N (listwise)	60				

Link function: Negative Log-log.

Berdasar Tabel. 4.2 diketahui bahwa jumlah data yang diuji berjumlah 60 data. Hasil uji untuk rasio kemandirian (KKD) diperoleh nilai minimum 0.4 yang ditemukan pada provinsi DI Yogyakarta tahun 2011, nilai maksimum 5.05 diperoleh provinsi Banten tahun 2015 dan nilai rata-rata 2.1057. Hasil uji untuk rasio Efektivitas (EFE) diperoleh nilai minimum sebesar 0.41 yang didapat provinsi DI Yogyakarta tahun 2012, nilai maksimum 1.36 didapat oleh provinsi Banten tahun 2020 dan nilai rata-rata sebesar 1.0402. Sedangkan hasil uji untuk rasio Efisiensi (EFI) diperoleh nilai minimum sebesar 0.03 yang didapat provinsi Banten dari tahun 2014 sampai dengan 2017, nilai maksimum 0.58 yang didapat provinsi DKI Jakarta tahun 2015 dan 2016 dan nilai rata-rata sebesar .2627. Adapun hasil uji untuk rasio pertumbuhan (PERTBHN) diperoleh nilai minimum sebesar -0.18 yang didapat provinsi DKI Jakarta tahun 2020, nilai maksimum sebesar 0.68 yang didapat provinsi Banten 2011 dan nilai rata-rata sebesar 0.1252.

Analisis Uji Parameter Regresi

Hasil uji kelayakan (Goodness of Fit) ditemukan bahwa hasil uji Pearson sebesar 79.004 untuk nilai Chi Square dan sig sebesar 1.000 lebih besar dari 0.05 dan hasil uji Deviance sebesar 64.420 untuk nilai Chi Square dan sig sebesar 1.000 lebih besar dari 0.05. Hal ini berarti baik uji Pearson maupun uji Deviance diperoleh nilai sig > 0.05 yang berarti model regresi yang dihipotesiskan mampu dijelaskan oleh data yang diobservasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa mdel regresi ini layak (Fit).

Berdasarkan hasil Test of Parralel Lines pada Tabel. 5 diperoleh nilai sig 0.067 lebih besar dari 0.05, sehingga dapat dikatakan bahwa model yang dihasilkan mempunyai parameter yang sama dengan parameter variabel independen sehingga tidak perlu membuat permodelan kembali.

Hasil pengujian Model Fitting Information di Tabel. 6 diperoleh nilai sig < 0.05 yang berarti bahwa varibel independen (kinerja keuangan daerah) secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen (opini audit)

Tabel 5 Hasil Uji Parameter Regresi

	Estimate	Std. Error	Wald	df	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
Threshold [NILAI = 1,00]	-2.378	1.452	2.683	1	.101	-5.223	.467
[NILAI = 3,00]	-1.197	1.402	.729	1	.393	-3.946	1.551
[NILAI = 4,00]	-.643	1.395	.213	1	.645	-3.378	2.091
LocationKKD	-.869	.212	16.854	1	.000	-1.284	-.454
EFE	2.676	1.443	3.440	1	.064	-.152	5.504
EFI	-1.164	1.202	.938	1	.333	-3.520	1.192
PERTBHN	-4.597	1.923	5.714	1	.017	-8.366	-.828

Nilai sig untuk rasio kemandirian daerah (KKD) sebesar 0.000, yang berarti bahwa KKD berpengaruh terhadap Opini Audit. Koefisien beta KKD adalah -0.869 yang berarti terdapat hubungan terbalik. Semakin tinggi rasio kemandirian menunjukkan bagus opini audit BPK. Hasil ini dapat dikatakan anomali.

Nilai sig untuk rasio Efektifitas (EFE) PAD sebesar 0.064, yang berarti bahwa EFE tidak berpengaruh terhadap Opini Audit. Koefisien beta EFE adalah 2.676 (positif) yang berarti bahwa semakin efektif pengelolaan EFE berdampak pada searah dengan opini audit BPK.

Nilai sig untuk rasio Efisiensi (EFI) PAD, sebesar 0.333. yang berarti bahwa EFI pengelolaan PAD tidak berpengaruh terhadap Opini Audit BPK. Koefisien beta EFI adalah -1.164. Dapat diartikan bahwa semakin efisien maka opini audit semakin buruk.

Nilai sig untuk rasio Pertumbuhan (PERTBHN) PAD sebesar 0.0170. Hal ini dapat diartikan bahwa Pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap Opini Audit. Koefisien beta PERTBHN adalah -4.597, dapat disimpulkan bahwa semakin pertumbuhannya PAD nya bagus maka semakin buruk opini yang disampainya. Hasil ini dapat dikatakan merupakan anomali.

Koefisien Determinasi Model

Berdasarkan pengujian Koefisien Determinasi Model yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (kinerja keuangan) terhadap variabel dependen (opini audit).

Tabel 6 Pseudo R Score

Cox and Snell	.415
Nagelkerke	.519
McFadden	.333

Sumber: Link Function: Negatif Log-Log

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai *Pseudo R_Square* (R^2) Nagelkerke sebesar 0.519 atau 51.9 persen, yang artinya bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 51.9 % sedangkan sisanya sebesar 48.1 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Model Regresi Logistik Ordinal

Model persamaan regresi logistik ordinal dibentuk dari parameter-parameter regresi logistik yang dihasilkan dari uji parameter.

Tabel 7 Parameter Estimates

	Estimate	Std. Error	Wald	df	Sig.	95% Confidence Interval	
						Lower Bound	Upper Bound
Threshold [NILAI = 1,00]	-2.378	1.452	2.683	1	.101	-5.223	.467

	[NILAI = 3,00]	-1.197	1.402	.729	1	.393	-3.946	1.551
	[NILAI = 4,00]	-.643	1.395	.213	1	.645	-3.378	2.091
Location	KKD	-.869	.212	16.854	1	.000	-1.284	-.454
	EFE	2.676	1.443	3.440	1	.064	-.152	5.504
	EFI	-1.164	1.202	.938	1	.333	-3.520	1.192
	PERTBHN	-4.597	1.923	5.714	1	.017	-8.366	-.828

Link Function: Negatif Log-Log

Mengacu hasil uji regresi logistik ordinal di Tabel. 4.5. diketahui variabel dependen adalah NILAI yaitu Opini Audit dan variabel independen adalah Kinerja Keuangan Daerah yang terdiri dari Rasio Kemandirian Daerah (KKD), Rasio Efektifitas (EFE), Rasio Efisiensi (EFI), dan Rasio Pertumbuhan (PERTBHN) dengan skala pengukuran Rasio sehingga diperoleh persamaan logistik ordinal sebagai berikut:

$$\text{OPINI AUDITOR} = -2.378 - 0.869 \text{ KKD} + 2.676 \text{ EFE} - 1.164 \text{ EFI} - 4.597 \text{ PERTMBHN}$$

Pembahasan

Pengaruh Kemandirian Terhadap Opini Audit

Kemandirian (KKD) berpengaruh terhadap Opini Audit, namun memiliki koefisien beta bernilai negatif dan bersifat tidak biasa atau anomali. Seharusnya semakin mandiri pemerintahan daerah maka sudah selayaknya memperoleh opini audit BPK yang tinggi derajatnya.

Terjadinya anomali karena, kemandirian seluruh propinsi di Pulau Jawa ini memiliki rasio di atas 50% kecuali DIY tahun 2011. Nilai rasio kemandirian ini termasuk dalam kategori mandiri, namun kita perlu perhatikan bahwa rasio kemandirian secara umum mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir. Sebaliknya, kenyataannya opini audit BPK yang diperoleh masing-masing Propinsi menunjukkan hasil dengan predikat bagus (kecuali kasus di Propinsi Banten tahun 2013 dan 2014). Kondisi inilah yang dapat menjelaskan terdapat hubungan negatif antara kemandirian pemeritahan propisi dengan opini audit. Kemandirian seluruh Propinsi yang ada di pulau Jawa selama 10 tahun terakhir, memiliki rasio lebih dari 50% sehingga dapat dikatakan sangat baik.

Terdapatnya hubungan antara kemadirian dengan opini audit. menunjukkan bahwa kemandirian pemerintahan Provinsi di Jawa memengaruhi Opini Audit yang diberikan BPK atas hasil pemeriksaan LKPD Provinsi. Kemandirian pemerintah daerah adalah upaya pemerintah Provinsi untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan sumber dana pengelolaan lainnya yaitu Bantuan Pemerintah maupun Pinjaman Provinsi sebagai sumber dana pengelolaan keuangannya. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata Rasio kemandirian Pemerintah Provinsi di Jawa 2.1057. Namun kemandirian ini tidak terjadi pada Pemerintah Daerah Isitimewa Yogyakarta.

Keberhasilan dalam memperoleh PAD di Pemerintah Provinsi di Jawa telah dikelola dengan sangat baik dengan memperhatikan sistem pengendalian internal, ketaatan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan tingkat peyalahgunaan/tindak korupsi yang rendah bahkan tidak ada penyalahgunaan. Opini Audit WTP yang diperoleh menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian yang diterapkan dalam organisasi Pemerintahan Propinsi di Jawa telah berjalan baik dan efektif. Hal ini berdampak pada rendahnya penyalahgunaan/korupsi yang terukur dari rendahnya nilai materialitas penyimpangan yang terjadi (Henry 2018) Pemerintahan Propinsi di Pulau Jawa dalam memenuhi Standar akuntansi Pemerintahan pun telah dilakukan secara optimal, sehingga memenuhi kualitas informasi yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Namun demikian, perlu menjadi perhatian bahwa, koefisien regresi bernilai negatif, yang berarti bahwa terdapat hubungan tidak searah antara kemandirian pemerintahan Provinsi di Pulau Jawa dengan Opini audit. Apabila diperhatikan Ratio Kemandirian provinsi di Jawa selain DIY, mengalami penurunan seiring waktu. Pada kurun waktu 10 tahun terakhir hampir semua Provinsi mengalami penurunan Ratio Kemandirian, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu butuh perhatian khusus dari pemerintahan Provinsi di Pulau Jawa untuk terus meningkatkan Rasio Kemandirian, melalui peningkatan PAD secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Oktaviani dan Sari (2020) yang menemukan bahwa tingkat kemandirian suatu daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangannya. Begitu juga dengan pendapat Zulkarnain dan Andriansyah (2018) dan Putri & Badrudin, (2017) menemukan bahwa terdapat hubungan antara rasio kemandirian suatu daerah dengan opini audit yang diperoleh daerah tersebut.

Penelitian ini berbeda hasilnya dengan penelitian Takawalubde, dkk. (2017) dan Hamidayanti dan Wardani (2019) yang menyatakan bahwa rasio kemandirian tidak memiliki pengaruh terhadap opini audit.

Pengaruh Efektivitas Terhadap Opini Audit

Capaian Efektivitas tidak berpengaruh terhadap Opini Audit. Secara keseluruhan semua provinsi memiliki kinerja efektivitas yang sangat efektif, yang menunjukkan rata-rasio efektifitas PAD semua provinsi selama 10 tahun terakhir 1.042 dengan standar deviasi 0,12984. Sementara itu tahun 2020 untuk provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY memiliki rasio di bawah 100% namun masih dalam kategori efektif, terlebih ini diakibatkan banyaknya sumber PAD yang sangat berkurang akibat pandemi.

Capaian efektivitas tidak berpengaruh terhadap opini audit, hal ini diantaranya disebabkan standar deviasi rasio efektivitas menunjukkan data yang homogen. Merujuk pada Tabel 4.4 Statistik deskriptif, dapat dilihat dari nilai rasio efektifitas minimal 0,41 dan maksimal 1,36. nilai rata-rata 1,0402 dan standar deviasi untuk efektivitas adalah 0.12984. Sebaran data dengan kondisi inilah yang menyebabkan capaian efektifitas tidak memengaruhi opini audit.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Takawalude, dkk., (2017), Zulkarnain dan Andriansyah (2018), Hamidayanti dan Wardani (2019) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas tidak memiliki pengaruh terhadap opini audit. Sebaliknya hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Kurnia dan Arza (2019) yang menemukan bahwa rasio efektivitas memiliki hubungan dengan opini audit.

Pengaruh Efisiensi Terhadap Opini

Berdasarkan hasil uji Parameter Estimates ditemukan bahwa Efisiensi tidak berpengaruh terhadap Opini Audit. Dapat diartikan bahwa Capaian efisiensi pemerintah provinsi dalam merealisasikan PAD tidak berpengaruh terhadap opini audit. Capaian efisiensi pemerintahan provinsi tidak berpengaruh terhadap opini audit, hal ini dapat dijelaskan bahwa diantaranya disebabkan oleh hampir semua pemerintah Provinsi telah berhasil mencapai kinerja Efisien dalam merealisasikan PAD. Data ratio efisiensi menunjukkan data homogen yang terukur dengan nilai ratio efisiensi minimal 0.03, maksimal 0.58, nilai rata-rata 0.2627 dan standar deviasi 0.15907. data ini tersaji pada Tabel 4.4. Statistik Deskriptif di atas. Kondisi sebaran Kinerja efisiensi Pemerintahan Provinsi di Pulau Jawa inilah yang menyebabkan Capaian efisiensi tidak memengaruhi opini audit BPK.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Takawalude, dkk. (2017), Zulkarnain dan Andriansyah (2018), Hamidayanti dan Wardani (2019) yang menyatakan bahwa rasio efisiensi tidak memiliki pengaruh terhadap opini audit. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Kurnia dan Arza (2019) yang menemukan bahwa rasio efisiensi memiliki hubungan dengan opini audit.

Pengaruh Pertumbuhan Terhadap Opini Audit

Pertumbuhan PAD Pemerintahan Provinsi di Jawa memengaruhi opini audit dengan slope regresi negatif. Ratio Pertumbuhan merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan keberhasilan dalam memperoleh PAD dari tahun ke tahun. Rasio pertumbuhan PAD selama 9 tahun terakhir yaitu 2011-2019 selalu mengalami pertumbuhan. Meskipun pertumbuhan PAD setiap tahunnya tidak selalu lebih besar dari pertumbuhan tahun sebelumnya.

Pada umumnya setiap provinsi mengalami penurunan ratio pertumbuhan. Ratio Pertumbuhan selama 2011-2019. Bahkan pada tahun 2020, semua provinsi kecuali Banten memiliki rasio Pertumbuhan PAD negatif. Kita dapat memahami hal ini tentunya dipengaruhi oleh bencana Global Pandemi Covid 19. Pertumbuhan PAD yang negatif memengaruhi opini audit, karena keberhasilan dalam memperoleh pendapatan asli daerah selalu tumbuh menjadi kinerja yang tidak dapat diabaikan. Pertumbuhan PAD memiliki arti bahwa pemerintah Provinsi selalu berupaya meningkatkan PAD dan terus melakukan

inovasi agar terus menciptakan obyek PAD. Seperti halnya dengan Kemandirian Provinsi, pengelolaan PAD yang baik akan menciptakan pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun. Dengan didukung oleh SPI yang efektif maka akan terhindar dari penyalahgunaan aset. Pertumbuhan PAD yang didukung dengan SPI yang baik, rendahkan korupsi akan sangat membantu proses pertumbuhan sebuah Provinsi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Putry dan Badrudin (2017), Kurnia dan Arza (2019) yang menemukan bahwa rasio pertumbuhan memiliki hubungan dengan opini audit. Sementara itu hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Zulkarnain dan Andriansyah (2018) yang menyatakan bahwa rasio pertumbuhan tidak memiliki hubungan terhadap opini audit.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Rasio Kemandirian dan Rasio Pertumbuhan berpengaruh terhadap Opini Audit. Keberhasilan Pemerintah daerah dalam mengelola sumber dana yang berasal dari PAD, memacu Pemerintah Propinsi untuk melakukan Pengendalian Internal yang baik dan efektif, sehingga mampu memitigasi risiko tindak kecurangan dan didukung oleh Penerapan SAP dalam melaksanakan proses akuntansi Pemerintahannya. Rasio Pertumbuhan terjaga namun demikian, mengalami penurunan dari tahun ke tahun, terlebih pada tahun 2020, tentunya dapat dimaklumi karena kondisi Bencana global Pandemi Covid 19
2. Kinerja Efektifitas dan efisiensi tidak berpengaruh terhadap Opini Audit diantaranya disebabkan oleh homogenitas capaian baik efektifitas maupun Efisiensi di Pemeritahan Propinsi di Pulau Jawa.

Saran

Hasil penelitian bermanfaat bagi Pemerintah Propinsi di Pulau Jawa sebagai evaluasi kinerja keuangan yang terkait dengan PAD. Pemerintah Propinsi sebaiknya terus memperhatikan dan mengatasi permasalahan tingkat kemandirian yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Terkait dengan efisiensi dan efektifitas pemerintah Propinsi di Jawa dapat lebih bersaing untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data Opini Audit Hasil Pemeriksaan. Diakses 1 Juni 2022, dari www.bpk.go.id
- [2] Badan Pusat Statistik. Di akses 13 Juli 2020, dari www.bps.go.id
- [3] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Laporan Realisasi APBD Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2018. Di akses 3 Juni 2010 dari www.djpk.kemenkeu.go.id
- [4] Ghozali. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- [5] Halim, Abdul. 2014. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- [6] Hamidayanti, Luthfina dan Marita Kusuma Wardani. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Seminar Nasional dan The 6th Call for Syariah Paper. UMS.
- [7] Heriningsih, Sucahyo dan Ruserlistyani. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 13 No. 2:11-19.
- [8] Herry Aprillia Manubulu, 2018, Pengaruh Kinerja Pengelolaan Anggaran dan Efektivitas Pengendalian internal terhadap Laporan Hasil Audit, Jurnal Wahana Vol, 21 No.1.:17-29
- [9] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses 13 Juli 2020, dari www.kemendagri.go.id
- [10] Kurnia, R. dan Fefri Indra Arza. 2019. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini WTP Dengan Pemerintah Daerah yang Memperoleh Opini Non WTP (Studi Empiris pada Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2017). Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol. 1, No 2, Seri C, Hal 781-794.
- [11] Mahmudi. 2019. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Keempat. UPP STIM YKPN.
- [12] Mardiasmo. 2014. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi Offset.

- [13] Oktaviani, Matilde Agnes dan Dian Purnama Sari. 2020. Pengaruh Kemandirian Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (1), 186-193.
- [14] Pamungkas, Bambang, Reisya Ibtida dan Cendy Avrian. 2018. Factors Influencing Audit Opinion Of The Indonesian Municipal Governments' Financial Statements. *Cogent Business & Management*, 5:1, 540256.
- [15] Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah RI No 12 Tahun 2019 Permendagri Nomor 19 Tahun 2020
- [16] Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
- [17] Pratiwi, Ristu dan Y Anni Aryani. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Opini. *Jurnal Akuntansi/Volume XX*, No. 02, 167-189.
- [18] Provinsi Banten. Tentang Provinsi Banten. Diakses 1 Juni 2022, dari www.dmsppid.bantenprov.go.id
- [19] Provinsi Jawa Timur. Tentang Provinsi Jawa Timur. Diakses 1 Juni 2022, dari www.bappeda.jatimprov.go.id
- [20] Provinsi Yogyakarta. Tentang Provinsi Yogyakarta. Di akses 1 Juni 2022, dari www.jogjaprov.go.id
- [21] Pulau Jawa. Tentang Provinsi di Pulau Jawa. Diakses 13 Juli 2020, dari <https://id.m.wikipedia.org>
- [22] Putry, Nur Anita Chandra dan Rudy Badrudin. 2017. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Opini Audit dan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. *JRMB*, Volume 12, No. 1: 25-34.
- [23] Saputra, C. S., Suwendra, W.I, & Yudiantmaja. F(2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*, Vol.4.
- [24] Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta : Graha Ilmu. Susilowati, Suharno, dan Kristiano. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten
- [25] Karanganyar Tahun Anggaran 2013-2015. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi* Vol. 12 No. 2. Hal. 229-237.
- [26] Takawalude, Erick H, Parengkuan Tommy, dan Joubert B Maramis. 2017. Komparasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Pada Opini Disclaimer dan WDP. *Jurnal EMBA* Vol. 2 No. 2, Hal. 1802-1812.
- [27] Undang-Undang No 33 Tahun 2004
- [28] Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
- [29] Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- [30] Yamin, Sofyan dan Heri Kurniawan. 2009. *SPSS Complete: Teknik Analisis Statistik Terlengkap dengan Software SPSS*. Jakarta: Salemba Infotek.
- [31] Zulkarnain dan Rezka Andriansyah. 2018. Opini Audit BPK-RI dan Substansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat (Audit Opinions and the Financial Performances of the Local City/Regency Government in West Kalimantan Province). *CAKRAWALA – Repository IMWI* Volume 1, Nomor 1: 58-74.